



LAPORAN KEMAJUAN POKJA PENATAAN TATALAKSANA

AGUSTUS 2018



LKE POKJA PENATAAN TATALAKSANA

- Seluruh data dukung sudah terupload, untuk data dukung yang bersifat internal, yang diupload ke website adalah executive summary dari dokumen tersebut
- Dokumen dapat diakses pada laman <https://rb.kominfo.go.id/index.php/portfolio/penataan-tatalaksana-tahun-2018/>

PROSES BISNIS DAN PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP) KEGIATAN UTAMA

	ASPEK	JAWABAN	NILAI	DATA DUKUNG
a.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A	Pedoman Sekjen No. 3 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kominfo.
b.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	A	<p>1.PM Kominfo No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemkominfo; 2.PM Kominfo No.27 Tahun 2013 tentang Penetapan SOP di Lingkungan Kemkominfo;</p> <p>A. PROSES UTAMA 1. REKAP SOP PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2. REKAP SOP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3. REKAP SOP PENINGKATAN TATA KELOLA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4. REKAP SOP PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</p> <p>B. PROSES PENDUKUNG 1. REKAP SOP PELAYANAN INFORMASI DAN MEDIA 2. REKAP SOP PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI 3. REKAP SOP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4. REKAP SOP PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM DAN KERJA SAMA</p> <p>C. PROSES SUMBERDAYA 1. REKAP SOP PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 2. REKAP SOP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM 3. REKAP SOP PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS 4. REKAP SOP PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 5. REKAP SOP PENGELOLAAN BMN DAN RUMAH TANGGA</p>

PROSES BISNIS DAN PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP) KEGIATAN UTAMA

	ASPEK	JAWABAN	NILAI	DATA DUKUNG
c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Sekjen Kominfo tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Tahun 2017 dan SK Sekjen Kominfo Nomor 26/2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Laporan notulensi tahun 2017 dan 2018 3. Dokumentasi (foto) evaluasi SOP
d.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Proses Bisnis dan SK Tim Prosedur operasional 2. Laporan Monev Peta Proses Bisnis dan Prosedur operasional secara berkala 3. Nota Dinas terkait dengan monev dan tindak lanjut peta proses bisnis dan prosedur operasional 4. Jadwal monev peta proses bisnis dan prosedur Operasional 5. Draft Permenkominfo SOTK yang baru 6. Draft Peta proses bisnis yang berubah SOTK-nya

E- GOVERNMENT

	ASPEK	JAWABAN	NILAI	DATA DUKUNG
a.	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	(YA)	1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo 2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo; 3. Kajian tentang Kelembagaan Baru PDSI sebagai CIO Kemkominfo; 1. Pembentukan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemkominfo PM No. 1155/2015; 2. Pembentukan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (CIO) PM No.1156/2015;
b.	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	A	1. Integrasi secara Single Sign On (SSO) dan penggunaan sertifikat digital melalui portal Kominfo (portal.kominfo.go.id) untuk mengakses aplikasi internal, adapun data dukung untuk kriteria ini adalah Screen capture SSO portal.kominfo.go.id dan aplikasi-aplikasinya 2. Sistem manajemen kepegawaian sudah terintegrasi dengan SiMAYA, Portal Intranet, Email, K-Cloud, KMS, APIK, e-SKP, SiDARA, e-Klinik. Sistem ini dikembangkan setiap tahun untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi. Data dukung untuk kriteria ini adalah Dokumen Manual dan pengembangan Aplikasi Simpatik, dan Laporan pengembangan aplikasi SIMPATIK 3. Penerapan tanda tangan digital pada proses kenaikan pangkat dengan data dukung screenshot penerapan tanda tangan digital untuk kenaikan pangkat
c.	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	A	1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo 2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo 3. Screen capture layanan publik kominfo terintegrasi layanan.kominfo.go.id 4. screenshot aplikasi SIMS+Host to Host dengan Bank+Machine to Machine dengan aplikasi operator selular; screenshot ISO aplikasi SIMS (layanan SDPPI) 5. screenshot layanan perizinan ppi dan kolaborasi dengan NPWP dari Ditjen Pajak 6. screenshot layanan perizinan terintegrasi aptika, dan petunjuk penggunaan layanan perizinan terintegrasi aptika 7. Layanan Pengaduan Publik Kominfo melalui layanan call center 159, dimana masyarakat bisa melaporkan aduan kinerja mengenai kominfo dan akan diinputkan oleh operator ke sistem untuk memperoleh tiket keluhan

E- GOVERNMENT

	ASPEK	JAWABAN	NILAI	DATA DUKUNG
d.	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	A	<p>Sistem pelayanan publik Kominfo telah menyediakan layanan optimalisasi, artinya sudah memiliki sistem pelayanan interaksi, transaksi, dan kolaborasi yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi. data dukungnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sekjen No.2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk TI di lingkungan Kemkominfo 2. Pedoman Sekjen No.1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kemkominfo 3. Screen capture layanan publik kominfo terintegrasi layanan.kominfo.go.id 4. screenshot aplikasi SIMS+Host to Host dengan Bank+Machine to Machine dengan aplikasi operator selular; screenshot ISO aplikasi SIMS (layanan SDPPI) 5. screenshot layanan perizinan ppi dan kolaborasi dengan NPWP dari Ditjen Pajak 6. screenshot layanan perizinan terintegrasi aptika, dan petunjuk penggunaan layanan perizinan terintegrasi aptika 7. Layanan Pengaduan Publik Kominfo melalui layanan call center 159, dimana masyarakat bisa melaporkan aduan kinerja mengenai kominfo dan akan diinputkan oleh operator ke sistem untuk memperoleh tiket keluhan 8. Dokumen TOR otomatisasi layanan perizinan

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

	ASPEK	JAWABAN	NILAI	DATA DUKUNG
a.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	(YA)	<p>Dasar dan landasan operasional PPID Kemenkominfo:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik > Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 > Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 Jo. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 yang telah diubah kedalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) > Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika > Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika > Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik > Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar informasi Publik Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Kominfo <p>(https://ppid.kominfo.go.id/about/landasan-operasional/)</p>
b.	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses	A	<p>Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui ppid.kominfo.go.id berupa informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar informasi Publik Tahun 2018 di lingkungan Kementerian Kominfo</p> <p>(https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/daftar-informasi-publik/)</p>
c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala	A	<p>Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada <i>website</i> ppid.kominfo.go.id di kanal laporan (https://ppid.kominfo.go.id/laporan/laporan-dan-evaluasi/)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID Kemkominfo mendapat peringkat ke-4 berdasarkan laporan Index Keterbukaan Informasi oleh Seknas FITRA, diterbitkan 2012; 2. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-1 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2011 dari KIP; 3. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2012 dari KIP; 4. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2013 dari KIP; 5. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 dari KIP; 6. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 dari KIP; 7. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-8 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 dari KIP; 8. PPID Kemkominfo mendapat penghargaan peringkat ke-7 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 dari KIP; <p>Hasil survey kepuasan IKM 2015 kategori BAIK</p> <p>https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/03/laporan-_ikm_2015-uptdocx.pdf</p> <p>Survey IKM Tahun 2017 masih dalam proses pengolahan data</p>

RENCANA AKSI

- Rekomendasi MENPAN : menyempurnakan peta proses bisnis yang sudah dimiliki sehingga mampu menghasilkan kinerja yang ingin dicapai

Aktifitas	Timeline	Kegiatan
1. Monev Implementasi Peta Proses Bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika	Desember	1. dan 2. Telah dilakukan review dalam rangka monev Implementasi Peta Proses Bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan output draft pedoman penyusunan peta proses bisnis dan SOP Administrasi Pemerintahan.
2. Review SOP berdasar Proses Bisnis dan SOTK PM No. 1 Tahun 2016;		3. Penetapan PM ttg Kearsipan:
3. Penetapan PM tentang Kearsipan	Sudah tercapai	a. Pedoman Menteri Kominfo No.3 Tahun 2018 ttg Klasifikasi Arsip dilingkungan Kemkominfo b. Pedoman Menteri Kominfo No.4 Tahun 2018 ttg Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dilingkungan Kemkominfo c. Pedoman Menteri Kominfo No.5 Tahun 2018 ttg Tata Naskah Dinas dilingkungan Kemkominfo
4. Penguatan Peran Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kominfo (ULP dan LPSE)	Sudah tercapai	4. ULP dan LPSE telah menggunakan SPSE versi terakhir (versi 4.2) sesuai dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Penguatan ZI Kominfo di Bidang Tatalaksana		5. Saat ini Itjen mengusulkan 2 satuan kerja (Dit.Telekomunikasi PPI dan Dit.Operasi SDPPI) untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM (mendukung penguatan dibidang Tatalaksana dalam hal Bisnis Proses, SOP, Penerapan TI, dan Keterbukaan Informasi Publik).

RENCANA AKSI

- Rekomendasi MENPAN : menyempurnakan peta proses bisnis yang sudah dimiliki sehingga mampu menghasilkan kinerja yang ingin dicapai

Aktifitas	Timeline	Kegiatan
<p>6. Review Masterplan TI Kemkominfo</p> <p>7. Penyusunan Tatakelola TI Kementerian Kominfo;</p> <p>8. Implementasi dan Monev e-Government yang terintegrasi</p> <p>9. Survei Kepuasan implementasi e-Government ;</p> <p>10. Surveillance ISO/IEC 27001:2013 ISMS Keamanan Informasi Data Center, Pusat Pemulihan Bencana dan Jaringan Kemkominfo</p> <p>11. Surveillance ISO/IEC 9001:2015 Quality Management Pengelolaan Presensi Absensi Kemkominfo.</p> <p>12. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SPSE sesuai target Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</p> <p>13. Pemenuhan kriteria keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas</p> <p>14. Survei Kepuasan Transparansi Informasi Publik</p>	<p>September</p> <p>Desember</p> <p>Setiap Bulan</p> <p>Minggu 2 Agustus Mulai survey</p> <p>13-14 Agustus</p> <p>September</p> <p>Sudah tercapai</p>	<p>6. Review Masterplan TI sedang dilakukan oleh PDSI saat ini.</p> <p>7. Tata kelola TI sedang disusun oleh PDSI</p> <p>8. Setiap bulan telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk integrasi pada system kepegawaian dengan absensi</p> <p>9. PDSI sedang menyusun rencana survey kepuasan implementasi e-gov dilingkungan Kominfo yang akan dilaksanakan secara online.</p> <p>10. Saat ini sedang dalam proses resertifikasi ISO/IEC 27001:2013 yang akan dilaksanakan audit eksternal pada tanggal 13-14 Agustus 2018.</p> <p>10. Saat ini sedang dalam proses surveillance ISO/IEC 9001:2015 yang akan dilaksanakan audit eksternal pada September 2018.</p> <p>12. Seluruh target capaian dalam aksi PPK PBJ sesuai inpres No 10/2016 telah dicapai oleh ULP dan LPSE dengan hasil baik (bahkan ada yang melebihi harapan)</p> <p>13. Kriteria keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada tahun 2017 sudah terpenuhi, dan untuk saat ini sedang dalam tahap penilaian kembali oleh KIP.</p> <p>14. Biro Humas sedang menyusun rencana Survei Kepuasan Transparansi Informasi Publik yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018.</p>

TIMELINE MONEV PROSES BISNIS

No	Aktifitas	Waktu						Keterangan
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Rapat Persiapan Monev Proses Bisnis Kominfo (Pedoman Sekjen No 3 Tahun 2017)							Minggu kedua bulan Juli
2	Review Perubahan Proses Bisnis Berdasarkan Permen SOTK Baru (Pengganti Permen Kominfo No 1 Tahun 2016)							
3	Pelaksanaan Penyempurnaan Proses Bisnis							
4	Penetapan Proses Bisnis Kominfo Yang Telah Disempurnakan							Apabila sudah disepakati perubahan Proses Bisnis maka dilanjutkan ke Penetapan, jika tidak akan dilanjutkan Tahun 2019



- TERIMAKASIH